KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
NOMOR: 0012/HK.01.01/K.SN-02/11/2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

MENIMBANG : a. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada lingkungan Bawaslu Kabupaten Barru dan mengimplementasikan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/Hk.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum. Maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada lingkungan Bawaslu Kabupaten Barru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Kelompok Kerja Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru

18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396);
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
20. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Konvensi International Labour Organization Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;
23. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Dan Perundungan (*Bullying*).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada lingkungan Bawaslu Kabupaten Barru, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada lingkungan Bawaslu Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. mengembangkan dan melaksanakan program sosialisasi dan peningkatan kapasitas untuk mencegah kekerasan seksual;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru

b. menyusun mekanisme penanganan yang aman dan rahasia bagi Pelapor;
c. melakukan penanganan terhadap informasi kinerja atau temuan kinerja terkait dugaan kekerasan seksual;
d. memberikan dukungan dan/atau pendampingan kepada Penyintas;
e. menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi yang terkait dengan Penyintas;
f. bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pihak berwenang lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual;
g. melaporkan hasil penanganan dugaan kekerasan seksual kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Barru untuk diambil keputusan melalui rapat pleno;
h. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
i. memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur berdasarkan hasil evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Barru.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barru
Pada 05 November 2026
Ketua Bawaslu Kabupaten Barru,

Najemuddin, S.E

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Yth. Anggota Bawaslu Kabupaten Barru
3. Yth. Kepala Sekretariat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barru.
4. Yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

Lampiran Keputusan
Nomor : **0012/HK.01.01/K.SN-02/11/2026**
Tanggal : **05 November 2026**

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

No	Nama & Gelar	Latar Belakang Jabatan & Profesi	Kedudukan Dalam Struktur Tim Pokja
1	**Najemuddin, SE**	Ketua Bawaslu Kabupaten Barru	**Penanggung Jawab**
2	**Farida, S.H., M.H.**	Anggota / Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Bawaslu Kab Barru	**Pengarah**
3	**Mastang, S.Pdi**	Anggota / Kordiv Hukum, Pencegahan dan Parmas dan Humas Bawaslu Kab Barru	**Pengarah**
4	**Drs. H. Muhaimin Muhammad, M.Si**	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barru	**Sekretaris**
5	**H. Jayanto Sabir, SE., MM**	Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kab Barru	**Wakil Sekretaris**
6	**Mursal, SE**	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kab Barru	**Wakil Sekretaris**
7	**Fatimah, S.sos**	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Barru	**Ketua**
8	**Suriani, S.E., M.M.**	Praktisi Konseling	**Wakil Ketua**
9	**Ilham Darwis, SH**	Penyuluh hukum UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Barru	**Anggota / Focal Point**
10	**Asmawati, S.Pd**	Ketua Fatayat NU / Penggiat Isu Kekerasan Seksual	**Anggota / Focal Point**
11	**Julianus Paladong, SH**	LSM Gentar / Penggiat Isu Kekerasan Seksual	**Anggota / Focal Point**
12	**Bdn, H. Nurwahidah, SST.,M.Kes**	Ketua IBI Kab Barru / Tenaga Medis	**Anggota / Focal Point**
13	**Ilham, S.Pd., C.PSS**	Praktisi Komunikasi / Specialist Public Speaking	**Anggota / Focal Point**
14	**Anni Sari, ST, M.AP**	Penata Layanan Operasional Bawaslu Kab Barru	**Staf Administrasi dan Operasional**
15	**Marsuki, SE, MM**	Penata Layanan Operasional Bawaslu Kab Barru	**Staf Administrasi dan Operasional**
16	**ST. Idawani, SH**	Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kab Barru	**Staf Administrasi dan Operasional**
17	**Nursaid, S.IP**	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama Bawaslu Kab Barru	**Staf Administrasi dan Operasional**
18	**Nasriani, S.AP**	Pengadministrasi Umum Bawaslu Kab Barru	**Staf Administrasi dan Operasional**
19	**Sulfitra, A.Md**	Pranata Keuangan APBN Terampil Bawaslu Kab Barru	**Staf Administrasi dan Operasional**
20	**Ayu Wulandari Kahar, SST., M.Kes**	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama Bawaslu Kab Barru	**Staf Administrasi dan Operasional**
21	**Narmita, S.I.Pust.**	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama Bawaslu Kab Barru	**Staf Administrasi dan Operasional**
22	**Dliyaulyaqin, ST**	Pranata Komputer Ahli Pertama Bawaslu Kab Barru	**Staf Administrasi dan Operasional**
23	**Asriani, SE, MM**	Perencana Ahli Pertama Bawaslu Kab Barru	**Staf Administrasi dan Operasional**
24	**Muhlis Bahri, SH**	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama Bawaslu Kab Barru	**Staf Administrasi dan Operasional**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru

25	**Sri Hardiyanti Lukman, SH., MH**	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama Bawaslu Kab Barru	**Staf Administrasi dan Operasional**
26	**Suci Rahma Pratiwi, SE**	Arsiparis Ahli Pertama Bawaslu Kab Barru	**Staf Administrasi dan Operasional**

Ditetapkan di Barru
Pada 05 November 2026
Ketua Bawaslu Kabupaten Barru,

Najemuddin, S.E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru